



**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 128 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan unit pelaksana teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat UPT Rumah Susun Sederhana Sewa adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPT Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPT Rumah Susun Sederhana Sewa dipimpin oleh kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT Rumah Sederhana Susun Sewa, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**  
**Kepala UPT**

**Pasal 5**

- (1) UPT Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas membantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan penggunaan rumah susun sederhana sewa.
- (2) UPT Rumah Susun Sederhana Sewa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan kegiatan di bidang pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
  - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
  - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPT Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai uraian tugas :
- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - b. melaksanakan administrasi operasional pengelolaan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - c. membuat perencanaan pelaksanaan pengelolaan termasuk perbaikan dan pemeliharaan terhadap rumah susun yang berada dalam penguasaan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - d. melaksanakan inventarisasi/pendataan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan rumah susun, peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - g. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - i. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedua**  
**Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
- a. mengelola urusan kepegawaian;
  - b. mengelola urusan keuangan;
  - c. mengelola urusan sarana dan prasarana;
  - d. mengelola urusan kehumasan;
  - e. mengelola urusan persuratan dan pengarsipan;
  - f. mengelola urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 7**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa di lingkungan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilannya.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 8**

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.
- (5) Apabila kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, maka kepala UPT dapat menunjuk kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Desember 2016

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

**TTD**

**IBRAHIM SALEH**

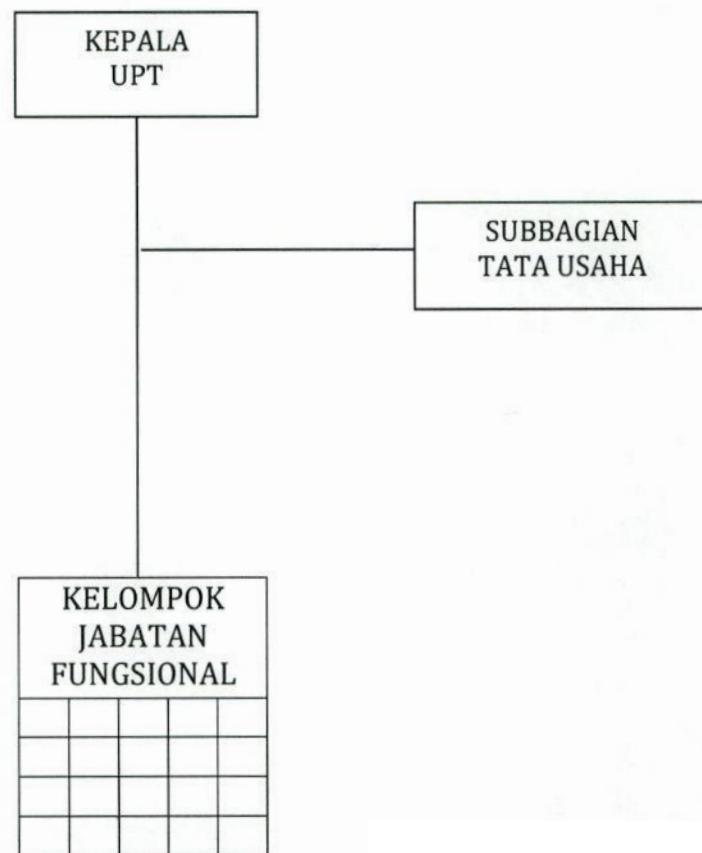
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 128

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,  
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**UAR, SH  
Pangkat : Penata Tk.I  
Nip : 19621002.199010.1.001**

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar  
Nomor : 128 Tahun 2016  
Tentang : Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**



**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**